

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan selalu erat kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. sehingga untuk mengoptimalkan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya-upaya guna memacu sektor-sektor yang diklaim potensial serta bisa memberikan kontribusi dalam menaikkan perekonomian, termasuk antara lain ialah sektor pariwisata. Dikemukakan oleh Wahab dalam Pendit (2006:32) bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup dan bisa menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya.

Sesuai Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah ialah hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sektor pariwisata ikut berperan penting dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi serta perjalanan dan meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengembangkan pariwisata terdapat beberapa model satu di antaranya yaitu pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat

atau yang dikenal menggunakan *Community Based Tourism* (CBT) ialah suatu konsep pengembangan sebuah destinasi wisata dengan memberdayakan warga lokal. Model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat *Community Based Tourism* (CBT) adalah model dengan peluang yang besar untuk masyarakat desa bisa berpartisipasi pada pembangunan pariwisata di desanya. Pelaku utama pada *Community Based Tourism* (CBT) yaitu masyarakat, dimana partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting mulai dari perencanaan, pengembangan serta pengelolaan desa wisata (Kriswibowo, 2018)

Pembangunan sektor pariwisata juga terjadi sebab adanya kelestarian keanekaragaman budaya dan keindahan alam menjadi konsep pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi masyarakat sekitar, pemangku kepentingan, serta nilai kepuasan bagi wisatawan dalam jangka waktu lama. Pariwisata saat ini sebagai suatu kebutuhan seluruh lapisan warga, maka dari itu perlu adanya pengembangan pariwisata, karena pariwisata mempunyai potensial yang penting bagi sumber pendapatan daerah. Oleh sebab itu dalam mengelola serta pengembangan pariwisata harus dilakukan secara serius dengan melibatkan pihak-pihak terkait, untuk berlomba-lomba membentuk produk wisata sesuai dengan tujuan pembangunan serta pengembangan pariwisata (Sari, 2020).

Pariwisata sendiri ialah salah satu model industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup serta mengaktifkan sektor produksi lain pada negara penerima wisatawan. Segi lain dari pariwisata hendaknya ditinjau dari sudut pandang negara penerima wisatawan. Pada hal ini pariwisata hendaknya ditinjau

menjadi sebuah industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial serta ekonomi, baik negara tersebut dikatakan telah maju ataupun berkembang. karena Indonesia sendiri ialah negara kepulauan dengan potensi yang besar hampir disegala sektor, salah satunya di sektor pariwisata (Robinson, dkk. 2019).

Sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata yang besar, tentu membuat sektor pariwisata Indonesia sebagai sorotan. Industri pariwisata di Indonesia harus menerima perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Pengembangan industri pariwisata sendiri memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah pada daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak menjadi industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu menaikkan perekonomian daerah terutama bagi wilayah yang merupakan daerah otonomi baru. agar tidak menjadi wilayah yang tertinggal, menggunakan potensi wilayah di sektor pariwisata yang dimiliki wilayah tersebut, harusnya dapat menjadi suatu batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada (Robinson, dkk. 2019).

Saat ini salah satu cabang dari kegiatan pariwisata yang sedang berkembang atau pertumbuhannya sangat pesat yaitu ekowisata yang memiliki potensi besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan diperkenalkan menjadi formasi pariwisata yang berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pembangunan (Tsaur dan Lin, 2006). Ekowisata ialah sektor pariwisata yang berpotensi menjadi salah satu penunjang perekonomian

nasional, dari ekowisata juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri.

Ekowisata hadir untuk meraih keuntungan serta kesempatan dalam pasar wisata dengan memberikan sebuah wisata yang menarik, memberikan keberagaman budaya, dan memberikan penghasilan di warga lokal tanpa menghambat lingkungan dengan memiliki aspek pendidikan dan informasi, aspek sosial budaya, aspek lingkungan, aspek keindahan, aspek etika serta reputasi, oleh karena itu, didalam perencanaan ekowisata harus diarahkan pada konsep, prinsip, serta analisis pasar tersebut (Sari, 2020).

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah Bab 1 Pasal 1 bahwa, Ekowisata ialah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan warga lokal. oleh karena itu, di dalam etika suatu perencanaan dan pengembangan ekowisata terdapat tiga perspektif yang perlu diperhatikan yaitu: (1) ekowisata sebagai produk; (2) ekowisata sebagai pasar; dan (3) ekowisata sebagai pendekatan pengembangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat daerah (OPD) melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan serta Pariwisata sesuai asas otonomi serta tugas pembantuan maka dari itu peran pemerintah Kabupaten Bekasi sangat diperlukan dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada serta yang belum tergali. Pemerintah Kabupaten harus turut

melibatkan seluruh aspek kehidupan warga bersama-sama menjadi penggerak untuk lebih mengembangkan semua potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan warga dan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bekasi. Hal ini dilakukan karena pelaku pariwisata tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat serta pihak swasta (Setya, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WJS Poerwadaeminta (1999). Pengembangan ialah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran pengetahuan serta sebagainya). Pengembangan ekowisata memerlukan sebuah strategi pola pengembangan ekowisata yang terpola supaya potensi yang dimiliki bisa berkembang secara optimal. Strategi menjadi hal penting yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah supaya kegiatan ekowisata ini sesuai dengan pencapaian tujuan yang sudah disepakati, dapat dilakukan dengan perencanaan serta pelaksanaan yang tepat pada memajukan sektor ekowisata di tingkat daerah dengan peran Pemerintah Daerah sebagai penggerak dalam menentukan strategi pengembangan ekowisata (Sari, 2020).

Strategi juga ialah sebuah rencana yang disatukan luas, dan diintegrasikan yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan menggunakan tantangan lingkungan serta dibuat untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang sempurna oleh organisasi (William, 2003 : 1). Pemerintah yang merancang strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan warga dalam pengembangan

ekowisata, sesuai dengan tugasnya pemerintah menetapkan arah kebijakan pariwisata diantaranya (Kementerian PPN/Bappenas, 2016):

1. Pemasaran pariwisata nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara.
2. Pembangunan destinasi wisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing didalam negeri serta diluar negeri.
3. Pembangunan industri pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal pada industri pariwisata nasional disetiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran.
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata dan organisasi kepariwisataan nasional.

Saat ini salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang sedang pada proses pengembangan dan memerlukan strategi pengembangan baik dari warga sekitar wisata maupun Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bekasi. Pada pelaksanaan pengembangan serta pembangunan dilakukan Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2018-2025 pasal 1 ayat 33 yaitu; kawasan strategi pariwisata Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat KSPK ialah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang memiliki pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan

sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, dan pertahanan serta keamanan (Sari, 2020).

Adanya ekowisata pada suatu kawasan mempengaruhi kehidupan warga disekitar destinasi pariwisata berada. Hal ini dikelola dengan baik, maka terjadi peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya bagian yang penting ialah kelestarian tempat, karena aktivitas wisata tersebut harus meningkatkan daya dukung lingkungannya (Tuasikal, 2020). Kawasan strategi pariwisata, Kabupaten Bekasi sendiri memiliki dampak besar untuk pertumbuhan perekonomian dan pemberdayaan sumber daya alam. Pariwisata Kabupaten Bekasi yang termasuk sebagai kawasan strategi pariwisata Kabupaten Bekasi akan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, untuk menjadi kawasan pariwisata resmi dan mendapatkan perhatian lebih dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi.

Sesuai Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025 pasal 20 ayat 1 yaitu, Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bekasi yang mencakup: (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Ekowisata Mangrove; dan (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Agrowisata.

Ekowisata sebagai kawasan strategis pariwisata daerah pengembangan pariwisata. sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2018 Bab V pasal 16 yaitu kriteria kawasan strategis pariwisata mencakup:

- a. Dapat memberikan nilai tambah terhadap kawasan industry dan peninggalan sejarah budaya setempat.

- b. Dapat memperkuat fungsi Kabupaten Bekasi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi Jawa Barat.
- c. Dapat memperkuat keberadaan kawasan industri, bangunan bersejarah dan budaya khas menjadi identitas Kabupaten Bekasi.

Pada Peraturan Daerah di atas ekowisata Sunge Jingkem hutan mangrove termasuk pada kriteria tempat pariwisata yang strategis untuk dikembangkan. Dari beberapa destinasi pariwisata yang ada pada Kabupaten Bekasi, yang sedang dalam pengembangan yaitu Ekowisata Sunge Jingkem yang terletak di Kampung Sembilangan Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya yang berada di daerah pesisir pantai dan merupakan salah satu yang memiliki potensi pantai yang indah, sungai dan mangrove. Pengembangan Sunge Jingkem diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Desa Samudera Jaya, dengan mendorong Desa Samudera Jaya untuk mengembangkan potensi desa. Hutan mangrove Sunge Jingkem ini populer karena mempunyai keunikan tersendiri, mulai dari bangunan-bangunan, spot-spot kekinian yang dijadikan objek foto, adanya kapal-kapal nelayan yang bisa ditumpangi untuk mengelilingi daerah hutan mangrove tersebut, dan adanya warung-warung kuliner khas kampung tersebut yang mendukung serta mengundang warga atau wisatawan untuk berkunjung atau melakukan aktivitas wisata di hutan mangrove Sunge Jingkem tersebut. Berikut ini peta lokasi Ekowisata Sunge Jingkem.

Gambar 1. 1
Denah Lokasi Ekowisata Sunge Jingkem



Sumber: POKDARWIS Ekowisata Sunge Jingkem

Pengembangan potensi yang dijadikan objek wisata yang berbasis kemasyarakatan yang dibangun secara swadaya dan swadana ini di awalnya dikelola oleh FPPL (Forum Pemuda Peduli Lingkungan) serta warga. Warga lokal menjadi pelaku wisata yang dikelola forum pemuda kampung setempat ditahun 2019, pengembangan ekowisata Sunge Jingkem bertujuan untuk mengangakat perekonomian serta meningkatkan kreatifitas warga dengan membuka peluang usaha bagi warga. Selama 2 tahun lebih dengan mendapatkan penghasilan yang cukup bagus dari pengunjung yang datang ke hutan mangrove Sunge Jingkem tersebut dapat mensejahterakan warga sekitar Sunge Jingkem. Kemudian dikelola oleh POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) untuk bisa terorganisir dengan lebih baik untuk meningkatkan perkembangan aktivitas wisata di hutan mangrove Sunge Jingkem tersebut. Dengan adanya pergantian pengelola ekowisata hutan mangrove Sunge Jingkem pengelola tidak ingin Sunge Jingkem tidak terorganisasi pada

pengelolaannya, serta tidak ingin pengunjung menurun kedepannya terlebih dengan adanya pandemi saat ini (Sari, 2020).

Namun sejauh pengembangan ekowisata Sunge Jingkem hutan mangrove ini, berdasarkan pengamatan penulis menemukan permasalahan bukan hanya dari menurunnya jumlah pengunjung saja, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan serta kendala seperti, pembinaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi yang belum optimal, sarana serta prasarana yang belum memadai, dan perlunya sinergitas destinasi wisata dengan Instansi/Dinas lain. Oleh karena itu, diharapkan pembenahan secara menyeluruh, juga upaya pengembangan pariwisata ekowisata Sunge Jingkem tersebut yang harus dilakukan dengan serius serta strategi yang tepat. Berikut di bawah ini data jumlah pengunjung wisatawan Ekowisata Sunge Jingkem.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Pengunjung Wisatawan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Pengunjung Wisatawan	Rata-rata Perbulan
1.	2019	51.474 orang	4.289 orang
2.	2020	48.326 orang	4.027 orang
3.	2021	23.284 orang	1.940 orang

Sumber: POKDARWIS Sunge Jingkem Sembilangan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Dalam Mengelola Ekowisata Sunge Jingkem Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya?
2. Bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam pengembangan ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengelolaan ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya.
- 2) Menganalisis strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam pengembangan ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya.
- 3) Menganalisis partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi ekowisata Sunge Jinkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang Strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan ekowisata telah banyak dilakukan sebelumnya, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) jurnal resume. Namun peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dalam mengelola ekowisata Sunge Jingkem di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya.

Rujukan Pertama, diperoleh dari artikel Jurnal yang berjudul “Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka (Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” pada tahun 2015, ditulis oleh Eva Rusdiananingtyas, Heru Ribawanto, dan Wima Yudo Prasetyo, yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11. Hal. 1898-1904. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi kekayaan alam dan warisan budaya yang terus dikembangkan sebagai tujuan wisata terfavorit baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian pembangunan sektor pariwisata DIY ternyata juga memunculkan berbagai tantangan dan kendala seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, serta pengembangan obyek wisata dan sarana prasarana yang belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan secara menyeluruh, juga upaya pengembangan pariwisata DIY harus dilakukan dengan serius dan strategi yang tepat. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu, bagaimana strategi Dinas Pariwisata DIY dalam mewujudkan DIY

sebagai tujuan wisata berbasis budaya terkemuka, bagaimana implementasi strategi Dinas Pariwisata DIY, dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi strategi Dinas Pariwisata DIY.

Penelitian ini merujuk pada teori Bryson (2007), jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi yang diterapkan Dinas Pariwisata DIY untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya terkemuka yaitu strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, strategi mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien, serta strategi mengoptimalkan perluasan jaringan kerjasama. Pelaksanaan atau implementasi dari strategi tersebut kemudian dijabarkan dalam tiga program utama yaitu program pengembangan destinasi, program pengembangan pemasaran, dan program pengembangan kemitraan. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas karena berfokus pada bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam mewujudkan wisata daerah yang berbasis budaya terkemuka. Dalam hal ini peneliti dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pengimplementasian program strategi Dinas Pariwisata melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Rujukan Kedua, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pandansari Kabupaten Brebes Untuk Mengurangi Kemiskinan” pada tahun 2020. Ditulis oleh Anisa Nur Andina, Siti

Barokah, Oryz Agnu Dian Wulandari, Arista Apriani Girsang dan Rizki Aprilia Nur Afifah, yang dipublikasikan dalam *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 7. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keindahan alam Kabupaten Brebes yang menjadikan Kabupaten Brebes sebagai primadona penuh misteri. Pada saat itu, tambak menjadi idola karena sangat menguntungkan dan penduduk menggantungkan hidup mereka dari tambak namun setelah beberapa tahun berjalan, abrasi atau kikisan air laut tidak bisa dihindari. Sampai akhirnya ada inisiatif untuk menanam mangrove untuk mengurangi abrasi. Upaya penataan dan pengembangan ekowisata mangrove Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes ini merupakan sebuah terobosan untuk mengembangkan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Brebes. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu, bagaimana strategi pengembangan ekowisata hutan mangrove Pandasari Kabupaten Brebes untuk mengurangi kemiskinan.

Penelitian merujuk pada teori (Nugroho, 2011). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep ekowisata yang diusung oleh mangrove desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes dinilai sangat menarik, terutama bagi generasi muda yang tidak hanya ingin berwisata tetapi juga ingin menambah pengalaman dan pendidikannya. Selain untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mengurangi kemiskinan, pengembangan ekowisata mangrove di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes telah dilakukan secara serius. Ekowisata mangrove Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes berlandaskan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar dan terus ditingkatkan

menjadi destinasi wisata nomor satu di Kabupaten Brebes bahkan Jawa Tengah. Penelitian ini berkaitan karena terdapat keterkaitan dalam upaya pengembangan ekowisata melalui pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian warga sekitar daerah dengan terus melakukan inovasi untuk menarik pengunjung akan ekowisata hutan mangrove tersebut.

Rujukan Ketiga, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng” pada tahun 2017. Ditulis oleh I Putu Ananda Citra yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 1. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu media yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bidang pariwisata khususnya ekowisata. Belum adanya strategi pemberdayaan sehingga menarik untuk dikaji karena kawasan ekowisata selain merupakan sumber pendapatan masyarakat juga berfungsi untuk konservasi keanekaragaman hayati dan kelestarian budaya masyarakat lokal. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana potensi sumber daya pesisir untuk pengembangan ekowisata, bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekowisata di pesisir Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan geografi yaitu pendekatan ekologis. Data yang dikumpulkan yaitu dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Sumber daya pesisir di Kabupaten Buleleng yang meliputi: (1) sumber daya hayati yaitu potensi perikanan dan terumbu karang, (2) sumber daya buatan yaitu dermaga dan (3) sumber daya jasa-jasa lingkungan yaitu keindahan terumbu karang, atraksi

lumba-lumba dan pemandangan sunset sebagai potensi ekowisata. 2) Strategi pengembangan sumber daya pesisir untuk pemberdayaan masyarakat pembudidayaan ikan, pelestarian terumbu karang, pelatihan peningkatan pelayanan wisata, penyediaan tempat pelelangan ikan, pengadaan modal dan kerjasama bagi usaha-usaha masyarakat dalam membuat kerajinan tangan, penegakan hukum atau awig-awig beserta sanksi, memberikan batasan masuknya produk perikanan dari luar daerah. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan karena nelayan hanya baru sebatas menangkap saja, maka itu perlunya pemberdayaan masyarakat dalam pembudidayaan perikanan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang diteliti karena adanya kesamaan peluang potensi sumberdaya yang dimiliki dan penting untuk dikelola dengan melibatkan pihak terdekat seperti masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Agar dapat memberikan kontribusi positif serta sebagai sumber pendapat masyarakat lokal.

Rujukan Keempat, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” pada tahun 2019. Ditulis oleh Trivan King Robinson, Burhanuddin Kiyai, Rully Mambo yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 084. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembangan industri pariwisata yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi daerah yang merupakan daerah otonomi baru. Dengan potensi daerah di sektor pariwisata yang dimiliki daerah tersebut, untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari

sektor pariwisata yang ada, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan provinsi dengan potensi pariwisata yang besar dan menawarkan berbagai obyek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Utara Kecamatan Bolaang Mongondow.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Strategi SO (*Strength and Opportunities*) menggunakan media promosi yang tepat sasaran sesuai dengan pasar yang akan dituju oleh Dinas Pariwisata sehingga target yang tepat dan terus dilakukan secara intensif akan membuahkan hasil yang sangat baik. (2) Strategi ST (kekuatan dan suguhan) Pemerintah Kabupaten Bolmut dapat menawarkan hal-hal baru yang menarik dan menjanjikan dengan penyajian kualitas sumber daya alam dan wisata yang menarik. (3) Strategi WO (kelemahan dan peluang) untuk memastikan bahwa tarif atau pungutan pada objek wisata serupa akan menjadi cara untuk mengatasi ancaman yang ada. (4) Strategi WT (kelemahan dan suguhan) meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung. Penelitian ini berkaitan karena dapat memberikan pemahaman terhadap pengukuran strategi Dinas Pariwisata pada faktor internal dan eksternal dengan menggunakan analisis

SWOT. Dengan begitu peneliti dapat membandingkan satu penggunaan teori dengan teori lainnya yang akan digunakan peneliti.

Rujukan Kelima, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis Dalam Pengembangan Pariwisata” pada tahun 2021. Ditulis oleh Iis Rahmayani, Sinta Ningrum, Dedi Sukarno yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Negara (JANE), Vol. 12, No. 2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis pasca Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mempunyai perencanaan strategis yang jitu untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Akibat lepasnya aset kepariwisataan tersebut juga membuat pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis harus mempunyai suatu perencanaan strategis yang jitu untuk mencari alternatif lain dalam mengembangkan potensi wisata serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan efektif. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten ciamis dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian ini merujuk pada teori Bryson, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Selain itu, penulis memperoleh data dan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan strategis merupakan cara atau tahapan yang

dapat membantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis untuk mengetahui dan menggambarkan strategi apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam rangka mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Dari kelima tahapan pokok perencanaan strategis yang telah dianalisis, khususnya pada tahapan akhir diperoleh tiga isu yang paling strategis, yaitu 1) Kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata. 2) Memperluas kerjasama antar pelaku wisata. 3) Memperkuat kualitas sumber daya manusia agar lebih kompeten. Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti karena mampu mengetahui dan menggambarkan strategi apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pariwisata yang ada dengan tahapan pokok perencanaan strategis yang telah dianalisis.

Rujukan Keenam, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019)” pada tahun 2021. Ditulis oleh Fena Pebriana, Rahman Mulyawan, Budi Sutrisno yang dipublikasikan dalam jurnal Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan), Vol. 1, No. 1. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kabupaten Majalengka memiliki objek dan daya tarik wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata seperti akses dari dan menuju tempat wisata, selain itu mayoritas destinasi wisata di Kabupaten Majalengka dikelola oleh kelompok masyarakat setempat sehingga masih kurangnya kesadaran dalam membayarkan pajaknya dan belum diterapkannya

sanksi bagi wajib pajak. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2019.

Penelitian ini merujuk pada teori (Geoff Mulgan, 2009), terdapat 5 (lima) komponen atau tahapan strategi pemerintahan, yaitu tujuan (*purposes*), lingkungan (*environments*), pengarahannya (*directions*), tindakan (*actions*), dan belajar (*learning*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, LAKIP (Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan) tahun 2018 dan 2019, dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka tahun 2018 - 2023, serta studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal dikarenakan belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kerja sama dan kemitraan, meningkatkan pemanfaatan media sosial, dan menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. Penelitian ini berkaitan karena terdapat keterkaitan strategi pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan mengutamakan

keindahan alamnya serta terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Rujukan Ketujuh, di peroleh dari artikel jurnal yang berjudul “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)” pada tahun 2014. Ditulis oleh Deddy Prasetya Maha Rani yang dipublikasikan dalam Jurnal Politik Muda, Vol. 3, No. 3, Hal. 412-421. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh industri pariwisata sebagai suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian. Untuk itu pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam, dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disini peneliti menuliskan bahwa pantai Lombang yang merupakan aset pemerintah memberikan sumbangsuhnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan otonomi daerah semakin baik tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yang terjadi di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Sehingga diperlukan perhatian dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sumenep, Madura. Dampak yang dialami Masyarakat Kabupaten Sumenep saat ini juga belum merasakan hasil yang besar dari pengembangan sektor pariwisata. Penelitian ini relevan karena mampu mengukur model strategi Dinas Pariwisata dengan membandingkan dari penelitian ini yang memiliki cara-cara dalam pengembangan pariwisata yang cukup baik sebab melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan komunitas serta adanya perbaikan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Rujukan Kedelapan, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan” pada tahun 2013. Ditulis oleh Putro Prasetyo dipublikasikan dalam Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Hal. 151-164. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengembangan pariwisata yang akhir-akhir ini banyak disoroti oleh media massa di Indonesia sejalan dengan program pemerintah. Namun telah di sadari bahwa peningkatan kepariwisataan di kota Tarakan, saat ini perkembangannya masih lambat dan di dalam usaha untuk melaksanakan peningkatan kepariwisataan tersebut mengalami masalah seperti belum efektif dan usaha pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di kota Tarakan. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi objek wisata di Kota Tarakan. Yang merujuk pada teori Gamal Suwanto (1997:56).

Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa keputusan-keputusan perlu dilihat dari sudut pandang misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, untuk mengetahui cara-cara perumusan strategi yang paling cocok. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan dalam pengembangan potensi objek wisata menetapkan strategi pengembangan dan kemudian membuat program-program pengembangan yang merangkum dari strategi yang telah ditetapkan agar memfokuskan kegiatan dalam hal pengembangan pariwisata di Kota Tarakan. Adapun program-program pengembangan pariwisata Kota Tarakan yaitu program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan, program pengembangan pengelola sumber daya pariwisata, dan program pengembangan apresiasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berkaitan karena adanya pengukuran strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan pariwisata yang memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan serta mengetahui cara-cara perumusan strategi yang paling cocok dengan diimplementasikan dalam program-program.

Rujukan Kesembilan, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Nitanghahai Di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah” pada tahun 2020. Ditulis oleh Tahir Tuasikal yang dipublikasikan dalam Jurnal Agrohut, Vol. 11, No. 1. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ekowisata di suatu kawasan mempengaruhi kehidupan masyarakat disekitar kawasan. Salah satu kawasan wisata pantai yang terletak di pesisir pantai Desa

Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah wisata Pantai Nitanghahai. Kawasan wisata ini memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi salah satu objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat di pulau Ambon dan sekitarnya termasuk wisatawan mancanegara. Perkembangan kunjungan wisata beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan studi untuk mengembangkan kawasan wisata. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Nitanghahai Di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataan daerah tujuan wisata pantai Nitanghahai umumnya terkenal dan mempunyai reputasi baik di Kabupaten Maluku Tengah, dengan keterbatasan pengembangan fasilitas yang ada, pantai Nitanghahai umumnya tidak henti-hentinya dikunjungi wisatawan meskipun perencanaan pengembangan cukup baik dan memadai. Maka peranan masyarakat daerah Kabupaten Maluku Tengah khususnya masyarakat desa Morella dalam proses strategi atau perencanaan sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai peran strategis dalam melakukan inisiatif perencanaan industri wisata pantai Nitanghahai dan melakukan promosi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan obyek wisata pantai Nitanghahai. Penelitian ini relevan karena dapat mengukur strategi yang digunakan dalam

penelitian ini untuk penelitian yang akan dilakukan melalui 6 strategi yaitu: mengembangkan wisata bahari, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan, berkerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah, dan pihak swasta, pengawasan terhadap pelanggaran konservasi, rancangan pengembangan wisata harus melibatkan orang yang berkopoten, dan pengelolaan yang dilakukan harus dilakukan secara bersama-sama.

Rujukan Kesepuluh, diperoleh dari artikel jurnal yang berjudul “Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang” pada tahun 2017. Ditulis oleh Mayang Vini Setya yang dipublikasikan dalam *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 04, Hal. 401-410. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah Kota yang harus turut melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bersama-sama sebagai penggerak untuk lebih mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dalam pengelolaan sektor pariwisata walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan banyak upaya yang memberikan hasil positif tapi dinilai masih kurang dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam upaya mengembangkan urusan Pariwisata di Kota Semarang tahun 2016.

Penelitian ini merujuk pada teori George Steiner (1979), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang dalam upaya mengembangkan pariwisata di Kota Semarang dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal di beberapa strategi. Strategi yang sudah berhasil diantaranya adalah dalam meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan. Pelaksanaan strategi lainnya belum maksimal dikarenakan ditemukan hambatan-hambatan. Penelitian ini berkaitan karena dapat melihat strategi apa saja yang sudah berhasil diterapkan dalam pengembangan pariwisata diantaranya meningkatkan apresiasi seni budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan profesionalisme SDM kepariwisataan.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi pariwisatanya saja (Eva Rusdiananingtyas, 2015; Trivan King Robinson, 2019; Iis Rahmayani, 2021; Deddy Prasetya Maha Rani, 2014; Putro Prasetyo, 2013; Mayang Vini Setya, 2017). Namun ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas Strategi Pengembangan Ekowisata dan Pariwisata tetapi berfokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat (Anisa Nur Andina, 2020; Fena Pebriana, 2021; I Putu Ananda Citra, 2017; Tahir Tuasikal, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih berfokus pada Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Dalam Mengelola Ekowisata Sunge Jingkem Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan juga menganalisis pengembangan ekowisata serta partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola potensi ekowisata. Penelitian ini menerapkan metode

penelitian kualitatif, teknik perolehan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan Administrasi Negara terkait dengan Strategi Pengembangan Pariwisata, Ekowisata, dan lainnya bagi seluruh daerah dan dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang akan datang dalam konteks yang sama mengenai strategi dalam mengelola serta mengembangkan pariwisata, ekowisata dan lainnya. Dalam hal ini juga hasil penelitian diharapkan sebagai titik acuan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, sebagai sumbangan pemikiran dalam mengelola serta mengembangkan potensi ekowisata di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian mengenai strategi Dinas Pariwisata dalam mengelola ekowisata, maka dari itu penulis membuat sistematika dalam Lima Bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian yang dilakukan, terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis dan yang terakhir sistematika

penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bab II: Kerangka Teori

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan strategi Dinas Pariwisata dalam mengelola ekowisata, yaitu konsep pengelolaan pariwisata, strategi pengembangan ekowisata, dan partisipasi masyarakat. Peneliti dalam bab ini juga menguraikan kerangka berpikir, dan asumsi penelitian tersebut.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknis analisis data, *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, serta membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

Bab V: Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun

rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya, dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka biasanya mengenai yang terdiri dari daftar buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis, serta produk hukum yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi.